

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi pada saat ini banyak memberikan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut merasakan kemudahan yang timbul dari arus globalisasi tersebut. Proses perkembangan globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut merupakan titik awal bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi di berbagai belahan dunia tanpa adanya penghalang baik itu jarak ataupun waktu. Arus globalisasi juga mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat dunia seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain (Nurhaidah & Musa, 2015: 5).

Dampak dari adanya arus globalisasi selain memberikan dampak positif bagi masyarakat terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yang ditimbulkan dapat dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan sebaliknya dampak negatif harus dicegah sejak dini. Bila dilihat dari sisi negatif dampak globalisasi banyak membuat masyarakat memiliki sifat seperti individualisme, hedonisme, materialisme, kesenjangan sosial, gaya hidup kebarat-baratan dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier tanpa disadari banyak menghasilkan sisa berupa limbah sampah yang langsung dibuang kelingkungan sekitar tanpa adanya pensortiran terlebih dahulu. Limbah sampah yang dihasilkan dari berbagai

kegiatan manusia ada yang di buang ke udara, tanah, dan perairan. Hal itu dapat merusak ekosistem yang ada dilingkungan tersebut. Sampah yang dihasilkan oleh manusia secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya bencana alam yang dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Menurut Mulyadi et al. (2010: 155), 70% masyarakat belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan yang rendah, penghasilan pekerjaan, kurangnya sosialisasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Nagra & Kaur (2014: 37), bahwa kerusakan lingkungan menjadi masalah global yang di antaranya melewati batas antar negara dengan faktor paling dominan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan. Saat ini banyak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal diperkotaan kurang memperhatikan keadaan ekosistem lingkungan disekitar tempat tinggal mereka. Kehidupan di kota rentan sekali dengan adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Karbon monoksida (CO) yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor memberikan efek negatif terhadap kesehatan manusia seperti sesak napas dan penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian apabila tidak adanya udara segar (Sengkey et al, 2011: 120). Hal senada juga diungkapkan oleh *Greenpeace* (2018), sebagai salah satu organisasi yang fokus terhadap isu lingkungan di dunia menjelaskan bahaya polusi udara berdasarkan hasil survei UNICEF penyakit yang ditimbulkan terkait masalah polusi udara membunuh sekitar 600.000 balita setiap tahunnya di dunia.

Pencemaran lingkungan dapat mengganggu kesehatan manusia, dan bahaya yang ditimbulkan akan berdampak dalam jangka panjang khususnya bagi

masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kurangnya rasa peduli dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan membuat kerusakan yang ditimbulkan semakin parah. Perilaku warga negara yang salah juga menjadi faktor dalam rusaknya lingkungan sekitar (Prasetyo & Budimansyah, 2011: 175). Pembuangan sampah sembarangan, kasus pembalakan hutan secara liar, dan pembuangan limbah pabrik yang mencemari lingkungan merupakan beberapa contoh yang terjadi akibat perilaku perusakan lingkungan. Menurut Zuchdi et al. (2012:1) degradasi moral, sikap, dan tindakan penyimpangan telah terjadi di lingkungan masyarakat merupakan suatu bentuk masalah. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin setiap hak penduduk untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menjelaskan bahwa didalam undang-undang tersebut mewajibkan masyarakat untuk memelihara fungsi dari lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang ada harus segera dicegah oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah, warga masyarakat, dan sekolah. Keterlibatan warga negara dalam upaya pelestarian lingkungan menjadi penting dikarenakan hal tersebut tidak akan terwujud tanpa keterlibatan warga negara. Tuntutan warga negara pada abad ini diperkuat pendapat Cogan & Derricott (1998: 2-3), bahwa saat ini warga negara harus memiliki karakteristik yang multidimensional meliputi adanya identitas diri, bebas dalam mendapatkan haknya, terlibat dalam kegiatan publik dan memiliki nilai kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa warga

negara yang ideal haruslah mampu menempatkan diri dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran pemerintah menjadi landasan dasar untuk mencapai tujuan pembentukan warga yang peduli lingkungan. Hal ini dikarenakan pemerintah mampu membuat dan menerapkan berbagai kebijakan yang akan diaplikasikan oleh warga negara. Salah satu program pemerintah untuk menindak lanjuti kerusakan lingkungan melalui program adiwiyata.

Kementerian lingkungan hidup mencanangkan program adiwiyata pada tahun 2006. Tindakan lanjut yang dilakukan kementerian lingkungan hidup ialah melakukan kerjasama dengan kementerian pendidikan nasional. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan, penilaian, dan pemberian penghargaan adiwiyata kepada sekolah. Adiwiyata memiliki arti sebagai tempat yang baik serta ideal untuk mendapatkan segala ilmu pengetahuan, norma serta etika yang menjadi dasar manusia guna terciptanya kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Program adiwiyata merupakan sebuah penghargaan yang dibentuk untuk mengapresiasi sekolah-sekolah yang menunjukkan komitmen serta mau bekerja keras untuk dapat memenuhi empat komponen pendukung adiwiyata yaitu:

- 1) Kebijakan sekolah berwawasan lingkungan,
- 2) Kurikulum sekolah berbasis lingkungan,
- 3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan
- 4) Pengelolaan sarana prasarana pendukung ramah lingkungan.

Program adiwiyata memberikan arahan kepada sekolah agar memiliki tata kelola yang baik serta memberikan pembelajaran pada siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Rotari & Komalasari (2017: 53), salah satu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan program adiwiyata yaitu dengan cara mengingatkan dan memberikan contoh. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan partisipasi dan kepedulian lingkungan siswa dengan cara ikut melaksanakan kegiatan penghijauan tanaman, pemilahan sampah, pengomposan, dan memanfaatkan lahan yang minim. Program adiwiyata menjadi media pemerintah untuk mengikut sertakan dan melibatkan masyarakat agar berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang cinta lingkungan.

Partisipasi masyarakat untuk membangun lingkungan hidup (ekologi) dalam ilmu kewarganegaraan dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis. Menurut Spannring (2019: 1-5), kewarganegaraan ekologis menekankan tanggung jawab, komunitas, dan kepedulian untuk mewujudkan warganegara yang peduli lingkungan tanpa mengabaikan dimensi sosial, ekonomi, politik secara berkelanjutan. Selanjutnya menurut Karatekin & Uysal (2018: 86), kewarganegaraan ekologis merupakan konsep yang memuat beberapa elemen seperti informasi, sikap terhadap lingkungan, tanggung jawab, keberlanjutan, partisipasi, serta hak dan keadilan. Kerja sama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk membentuk kewarganegaraan ekologis yang bertanggung jawab dan mengontrol atas segala hal yang berkaitan dengan ekologi.

Berdasarkan *Framework for 21st Century Learning* pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran inti yang harus mempromosikan pemahaman dengan tema interdisipliner abad ke 21 salah satunya adalah literatur lingkungan. Lingkungan menjadi persoalan yang sangat diperhatikan pada saat ini. Untuk membentuk karakter cinta terhadap lingkungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 membentuk suatu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang merupakan program kelanjutan dari gerakan nasional pendidikan karakter bangsa tahun 2010. Program tersebut merupakan bagian integral 8 Nawacita yang meliputi revolusi karakter bangsa dan gerakan nasional revolusi mental dalam dunia pendidikan yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan paradigma baik itu pola pikir dan cara bertindak, dalam mengelola sekolah (Perpres No 87 Tahun 2017). Hal senada juga di jelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, bahwa PPK diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi: 1) sekolah; 2) keluarga; dan masyarakat.

Program PPK mempunyai lima nilai karakter utama dengan subnilai yang saling berkaitan yaitu nilai gotong royong, nasionalis, religius, mandiri, dan integritas. Kelima nilai tersebut saling melengkapi sehingga dapat membentuk kepribadian seseorang. Nilai utama dalam program PPK memiliki subnilai yang masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda. Salah satu subnilai yang dikembangkan program PPK adalah menjaga lingkungan yang merupakan subnilai

dari nasionalis (Kemendikbud, 2017:7). Menjaga lingkungan menjadi penting karena peduli akan lingkungan menjadi salah satu indikator dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Desfandi (2015: 36), keterlibatan warga sekolah dapat menjadi contoh untuk masyarakat agar memiliki karakter peduli lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut semua pihak harus ikut berpartisipasi mulai dari pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat. Hal ini juga biasanya dicerminkan dalam budaya sekolah. Setiap sekolah memiliki aturan tersendiri, yang berupa serangkaian nilai, norma, aturan moral, dan kebiasaan yang telah membentuk perilaku serta hubungan-hubungan yang terjadi didalam lingkungan sekolah.

Sergiovanni (1984: 10), menjelaskan bahwa budaya berfungsi sebagai setting kompas untuk memberikan arahan apa yang harus dicapai dan bagaimana cara pelaksanaannya baik bagi guru, siswa, administrator, dan pihak lainnya saat mereka bekerja. Budaya sekolah perlu dipandang sebagai cara bersama untuk memahami praktik dan kebijakan, sebagai alternatif mengenai keputusan berdasarkan berbagai pilihan kebijakan, dan sebagai dasar untuk reformasi pendidikan. Ahmad, et. al (2019: 261-262), budaya sekolah merupakan seperangkat karakteristik yang membedakan satu sekolah dari yang lain dan mempengaruhi perilaku warga sekolah. Budaya sekolah berpengaruh tidak hanya pada kegiatan warga sekolah, tetapi juga pada prestasi, motivasi dan membentuk karakter siswa (Alema et.al 2017: 10). Adanya tindakan langsung yang diberikan oleh sekolah untuk siswa agar menjadi pribadi yang peduli akan lingkungan dengan cara menerapkan budaya sekolah berbasis lingkungan.

Untuk membentuk siswa agar mempunyai karakter kewarganegaraan ekologis dapat dilakukan dengan cara memberikan pengalaman positif kepada siswa melalui pendidikan yang ada di sekolah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017: 112), internalisasi perspektif lingkungan telah disosialisasikan di lingkungan sekolah yang mengikuti program adiwiyata berdasarkan visi dan misi, pengelolaan sarana dan prasarana, kurikulum dan kebijakan sekolah adiwiyata serta partisipasi aktif warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Anwari (2014: 241), strategi pembentukan karakter peduli lingkungan berdasarkan kegiatan belajar mengajar, budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan dukungan serta partisipasi dari orang tua peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian diatas untuk membentuk karakter kewarganegaraan ekologis harus disosialisasikan serta diaplikasikan dalam rutinitas sehari-hari kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, ekstrakurikuler, partisipasi orang tua, dan adanya program adiwiyata yang memberikan pengajaran untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Program yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yaitu program adiwiyata dan didukung dengan adanya budaya sekolah memberikan pengaruh yang positif terhadap siswa agar memiliki karakter kewarganegaraan ekologis. Program adiwiyata telah terintegrasi dalam setiap mata pelajaran salah satunya mata pelajaran PPKn. Pendidikan kewarganegaraan lebih dominan mengajarkan pendidikan moral serta karakter mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik guna membentuk kesadaran moral dan etika masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup (Rondli & Khoirinnida, 2017: 121).

Program adiwiyata memberikan penghargaan kepada sekolah yang telah berhasil memenuhi empat komponen yang telah ditentukan. Penghargaan yang diberikan dapat berupa piagam, piala dan atau bentuk lainnya. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata ada beberapa jenis dan bentuk penghargaan yaitu, 1) Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota mendapat penghargaan dari Bupati/Walikota, bentuk penghargaan berupa piagam dan piala; 2) Sekolah Adiwiyata provinsi mendapatkan penghargaan dari Gubernur, bentuk penghargaan berupa piagam dan piala; 3) Sekolah Adiwiyata nasional mendapatkan penghargaan piagam dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan piala dari Menteri Lingkungan Hidup; dan 4) Sekolah Adiwiyata Mandiri mendapatkan penghargaan piagam dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan piala dari Menteri Lingkungan Hidup, yang diserahkan oleh Presiden.

Dengan melaksanakan program adiwiyata diharapkan akan menciptakan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta mendukung terbentuknya karakter kewarganegaraan ekologis di lingkungan sekolah. Program ini dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan warga sekolah yang memiliki kepedulian dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pentingnya membentuk karakter kewarganegaraan ekologis melalui komitmen pribadi untuk belajar lebih banyak tentang lingkungan kemudian mampu

mengambil tindakan dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan yang bertanggung jawab (Szerszynski, 2006: 75).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang terdapat tiga sekolah yang pertama kali mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri yaitu SMA Negeri 17 Palembang pada tahun 2013, SMK Negeri 2 dan SMP Negeri 54 pada tahun 2014. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 17 Palembang karena sekolah mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri pada tahun 2013. Kekhasan yang dimiliki dari SMA Negeri 17 Palembang dalam mengelola lingkungan yang ada di sekitarnya, membuat sekolah tersebut mendapat penghargaan adiwiyata mandiri. SMA Negeri 17 Palembang ini pun tidak langsung mendapat julukan program adiwiyata mandiri, bermula dari adiwiyata kota dan provinsi yang didapat oleh SMA Negeri 17 Palembang dan berlanjut ke adiwiyata nasional. Selanjutnya SMA Negeri 17 Palembang harus membina setidaknya sepuluh sekolah binaan agar dapat mencapai adiwiyata mandiri. Berikut data yang peneliti dapat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang terkait sekolah yang dibina SMA Negeri 17 Palembang yaitu SMPN 1, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 13, SMPN 17, SMPN 18, SMPN 23, SMPN 26, SMPN 41, SMPN 43, SMP Pusri, SMAN 1, SMAN 7, dan SMAN 11.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rotari dan Komalasari (2017: 52), berjudul peran program adiwiyata mandiri dalam meningkatkan kepedulian lingkungan peserta didik. Untuk meningkatkan kepedulian peserta didik dengan cara mengikutsertakan peserta didik dalam

kegiatan penghijauan tanaman dan pengimplementasian yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Adam (2014: 171-172), dengan judul penelitian analisis implementasi kebijakan kurikulum berbasis lingkungan hidup pada program adiwiyata mandiri di SDN Dinoyo 2 Malang. Menjelaskan terdapat faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan kurikulum berbasis lingkungan hidup pada program adiwiyata mandiri dan solusi untuk mengatasinya dengan melakukan beberapa program. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Bahrudin (2017: 36), berjudul pelaksanaan program adiwiyata dalam mendukung pembentukan karakter peduli lingkungan di SMA Negeri 4 Pandegelang. Memaparkan bahwa empat aspek dalam program adiwiyata berperan dalam mengkondisikan lingkungan sekolah agar siswa terbiasa peduli lingkungan.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui pengaruh program adiwiyata dan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang karena belum ada penelitian yang meneliti pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis pada siswa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas permasalahan yang ditemukan, sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup sehingga hilangnya rasa kepedulian dalam merawat dan memelihara lingkungan yang ada disekitar.

2. Banyak terjadinya pencemaran lingkungan baik di darat, laut, dan udara yang merusak ekosistem lingkungan hidup.
3. Sekolah berperan penting untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan baik di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
4. Kurangnya pengetahuan mengenai program adiwiyata di lingkungan sekolah dan masyarakat.
5. Tidak semua sekolah memiliki budaya sekolah yang peduli lingkungan dikarenakan berbagai keterbatasan.
6. Kurangnya kerjasama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk membentuk karakter kewarganegaraan ekologis di lingkungan sekolah dan masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pengetahuan mengenai program adiwiyata di lingkungan sekolah dan masyarakat.
2. Tidak semua sekolah memiliki budaya sekolah yang peduli lingkungan dikarenakan berbagai keterbatasan.
3. Kurangnya kerjasama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk membentuk karakter kewarganegaraan ekologis di lingkungan sekolah dan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh program adiwiyata terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang?
2. Adakah pengaruh budaya sekolah terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang?
3. Adakah pengaruh program adiwiyata dan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Pengaruh program adiwiyata terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang.
2. Pengaruh budaya sekolah terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang.
3. Pengaruh program adiwiyata dan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan kajian terhadap pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan, sehingga memperkuat bidang keilmuan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter kewarganegaraan ekologis di lingkungan lembaga pendidikan (sekolah).

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi praktik bagi beberapa pihak berikut:

a. Bagi Sekolah

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada sekolah mengenai pengaruh program adiwiyata dan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan ekologis siswa di sekolah binaan SMA Negeri 17 Palembang.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan membantu untuk meningkatkan peran guru dalam membentuk karakter kewarganegaraan ekologis melalui program adiwiyata dan budaya sekolah.

c. Bagi Pemegang Kebijakan Pendidikan

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi pemegang kebijakan terutama dalam mengevaluasi sistem pendidikan di sekolah sehingga pemegang kebijakan mampu mengembangkan program yang sama dalam upaya membentuk karakter kewarganegaraan ekologis di sekolah lain.